
Kehidupan Budaya Etnis Tionghoa di Kota Sukabumi 1966 - 2002

Winda Fitri Febriani^{a, 1 *}, Dede Mahzuni^{b, 2}, Ayu Septiani^{c, 3}

^{a, b, c} Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia

¹ winda_fitrifebriani@yahoo.co.id, ² dade.mahzuni@unpad.ac.id, ³ ayu.septiani@unpad.ac.id

* Corresponding author

Abstrak

Artikel ini berjudul “Kehidupan Budaya Etnis Tionghoa di Kota Sukabumi 1966-2002”. Membahas mengenai kehidupan budaya etnis Tionghoa pada kurun waktu 1966-2002 yang mencakup kehidupan budaya etnis Tionghoa terutama pasca terjadinya kerusuhan anti-Tionghoa dan diterapkannya kebijakan pemerintah terhadap kehidupan etnis Tionghoa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri atas empat tahapan yakni, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Konsep yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah konsep akulturasi, asimilasi dan kebijakan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pada kurun waktu 1966-2002, sebagian besar etnis Tionghoa di Kota Sukabumi telah membaaur dengan masyarakat asli Sukabumi. Meskipun pada Mei 1963 terjadi kerusuhan anti-Tionghoa di Kota Sukabumi dan diterapkannya kebijakan yang membatasi ruang gerak etnis Tionghoa, hal tersebut tidak menghambat terjadi proses akulturasi dan asimilasi antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Sukabumi. Seperti, adanya perubahan nama menjadi nama Indonesia, perkawinan campuran, dan perayaan-perayaan dalam rangka Imlek, Cap Go Meh, dan perayaan lainnya.

Kata Kunci: Akulturasi, Asimilasi, Etnis Tionghoa, Kebijakan, Sukabumi

Abstract

This article is entitled "Chinese Ethnic Cultural Life in Sukabumi City 1966-2002". This article discussing about the ethnic Chinese cultural life in the period 1966-2002 which included the ethnic Chinese cultural life especially after the anti-Chinese riots and the implementation of government policies towards the ethnic Chinese life. The method used in this article is a historical method consisting of four stages namely, heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The concept used in this article is the concept of acculturation, affiliation and policy. The results obtained show that during the period 1966-2002, most of the ethnic Chinese in the City of Sukabumi had mingled with the native people of Sukabumi. Although in May 1963 there were anti-Chinese riots in Sukabumi City, and implementing policies that limit the ethnic Chinese space. This did not hamper the acculturation and assimilation process between the ethnic Chinese and the Sukabumi people.

Keywords : Acculturation, Assimilation, Chinese, Policy, Sukabumi.

PENDAHULUAN

Di Indonesia kita mengenal tiga penulisan yang berbeda untuk merujuk pada orang Tionghoa. Pertama yakni kata Cina. Sebelum RRC berganti nama menjadi Republik Rakyat Tiongkok (RRT), kata China merupakan penulisan resmi yang diinginkan oleh kedutaan RRC. Sementara kata Cina yang merujuk pada orang Cina adalah orang yang berkewarganegaraan Cina, seperti halnya orang Jepang, orang Indonesia, Orang India, dan sebagainya. Kedua, kata Tionghoa sendiri yakni merujuk pada orang-orang Cina di Indonesia yang dikenal sebagai orang Tionghoa. Kata Tionghoa bagi orang Tionghoa bermaksud untuk menunjukkan bahwa orang Cina berkewarganegaraan Indonesia disebut sebagai orang Tionghoa, seperti orang Jawa atau orang Sunda. Maka hal inilah yang menjadi pembeda antara orang Cina Warga Negara Asing dengan orang Tionghoa yang berarti Warga Negara Indonesia (Suryadinata, 2005).

Etnis Tionghoa merupakan salah satu etnis terbesar di dunia, hal inilah yang mengakibatkan banyaknya migrasi etnis Tionghoa ke berbagai kawasan di Asia Tenggara khususnya Indonesia, umumnya disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan produksi pertanian yang dihasilkan oleh negara Tiongkok. Sering terjadinya bencana alam, seperti udara yang sangat panas mengakibatkan berkurangnya hasil panen, bahkan gagal panen bisa berlangsung lama (Arania dalam Kartika, 1999). Indonesia menjadi salah satu tempat tujuan migrasi etnis Tionghoa, maka tidak mengherankan apabila banyak permukiman Tionghoa di Indonesia.

Etnis Tionghoa di Indonesia merupakan salah satu etnis minoritas yang memiliki pengaruh dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Hal ini telah terlihat sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, dimana etnis Tionghoa telah dijadikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai partner dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, permukiman etnis Tionghoa ditempatkan secara khusus terpisah dari masyarakat bumiputra, untuk membatasi interaksi antara masyarakat bumiputra dengan etnis Tionghoa. Meskipun demikian, pembauran tetap terjadi antara etnis Tionghoa dengan masyarakat bumiputera.

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan pengetahuan tentang kehidupan budaya etnis Tionghoa di Kota Sukabumi pada 1966-2002, memberikan informasi tentang kehidupan budaya etnis Tionghoa dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan budaya etnis Tionghoa di Kota Sukabumi pada 1966-2002. Fokus penelitian ini mengenai kehidupan budaya etnis Tionghoa di Kota Sukabumi, yang berkaitan dengan segala aktivitas kebudayaan, kepercayaan dan adat istiadat. Mengingat adanya perbedaan budaya yang sangat jauh antara etnis Tionghoa dengan kebudayaan setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lingkup spasial di Kota Sukabumi dan dilakukan pada 2017-2018. Batas temporal penelitian ini mengambil kurun waktu 1966-2002, sejak dikeluarkannya kebijakan ganti nama hingga ditetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Metode yang digunakan untuk penulisan ini

adalah metode sejarah. Dalam metode sejarah terdapat empat tahapan, yaitu heuristik, kritik interpretasi, dan historiografi (Herlina, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam laporan survei Andries Christiffel Johannes de Wilde tanggal 13 Januari 1815 dicantumkan nama Soekaboemi dan nama *Tji Colle* sebagai tempatnya menginap di kampung yang sekarang bernama Cikole. Kemudian, tanggal 13 Januari 1815 sebagaimana yang tercantum dalam laporan Survei Wilde, ditetapkan sebagai hari “Jadi” Sukabumi (Jaya, 2003). Nama Sukabumi sendiri, berasal dari dua kata yakni “Suka” dan “Bumi”. Menurut Djatnika Djakajanggala Kepala Bagian Kebudayaan Kabupaten Sukabumi, 4 April 1985 dalam ANRI (2013), kata “Suka” pada Sukabumi artinya “senang”, dan kata “bumi” artinya “rumah” atau “tempat tinggal”. Maka Sukabumi mengandung arti “senang berada di rumah”. Sementara dalam ensiklopedi bahasa Inggris, Sukabumi diterjemahkan sebagai “paradise” yang artinya “surga”. Pada awal abad ke-20 Kota Sukabumi telah berkembang sangat pesat, hal ini terlihat dari sudah lengkapnya fasilitas yang dapat dinikmati penduduk Kota Sukabumi. Tidak lama setelah jalur kereta api melintasi wilayah Sukabumi, penerangan listrik sudah dapat dinikmati oleh penduduk Sukabumi. Seperti halnya PLTA Cipetir Parakan Salak yang dibangun pada 26 Oktober 1911 dan PLTA Ubrug di Sukabumi pada 1923. Selain listrik sebagai fasilitas penerangan, dibangun kolam penampungan air bersih pada 1926. Sarana kesehatan juga sudah ada sejak lama di Sukabumi, yakni pada 1916 dibangun Rumah Sakit bernama Santa Lidwina di daerah Bunut yang saat ini lebih dikenal sebagai Rumah Sakit Bunut atau Mr. Syamsuddin (ANRI, 2013).

Berkaitan dengan penduduk di Kota Sukabumi, dari tahun ke tahun data statistik mengenai jumlah penduduk di kota dan Kabupaten Sukabumi menunjukkan angka yang berbeda karena mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Pada akhir tahun 1905, diperkirakan penduduk Kota Sukabumi berjumlah 15.080 jiwa. Jumlah ini hampir satu pertiga dari jumlah penduduk di Kabupaten Sukabumi. Penduduk di Kota Sukabumi dibagi atas tiga kelompok, yakni penduduk Eropa sekitar 588 jiwa, penduduk bumiputera sekitar 12.388 jiwa, dan penduduk Etnis Tionghoa sekitar 2.112 jiwa. Sementara menurut data statistik tahun 1926, di Kota Sukabumi jumlah penduduknya mencapai angka 23.520 jiwa, yang terdiri dari; penduduk Eropa berjumlah sekitar 1.520 jiwa, penduduk bumiputera berjumlah sekitar 19.000 jiwa, dan penduduk etnis Tionghoa berjumlah sekitar 3.000 jiwa. Sementara untuk Kabupaten Sukabumi berdasarkan data statistik tahun 1915, jumlah penduduknya mencapai angka 43.500 jiwa (Jaya, 2003; ANRI, 2013).

Kedatangan orang Tionghoa semakin meningkat setelah dibukanya jalur kereta api yang melintasi Sukabumi. Mereka kemudian ada yang menetap di Kota Sukabumi sehingga dibentuk permukiman khusus untuk etnis Tionghoa yang dikoordinir oleh kapiten Tionghoa dan ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda (Roswandi, 1987). Permukiman etnis Tionghoa Sukabumi berada di kawasan Odeon, keberadaan permukiman etnis Tionghoa atau “Pecinan Odeon” berada di sepanjang Jl. Penjagalan gang Parigi no. 20. Akan tetapi, sebelumnya kawasan pecinan tersebut berada di gang ikan

yang masih termasuk ke dalam kawasan pecinan Odeon. Pecinan Odeon Kota Sukabumi memiliki elemen-elemen seperti, kelenteng, pasar, ruko, sekolah, dan akses jalan (wawancara dengan Teddy1, 24 Mei 2017). Kelenteng Bie Hian Kong dibangun pada 1912, dan menjadi pusat kegiatan sembahyang maupun adat Istiadat etnis Tionghoa di Kota Sukabumi (Yayasan Vihara Widhi Sakti, 2012).

Keberadaan etnis Tionghoa mulai dibatasi oleh pemerintah Hindia Belanda dengan diterapkannya beberapa kebijakan seperti wijkenstelsel, yakni permukiman khusus etnis Tionghoa yang terpisah dari masyarakat bumiputera (Achmad, 2014). Selain itu, kebijakan lainnya adalah *passenstelsel* atau surat jalan untuk menghambat gerak masyarakat etnis Tionghoa. *Passenstelsel* digunakan masyarakat etnis Tionghoa sebagai akses keluar masuk wilayah pecinan. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik minoritas melalui tiga cara, pertama, pemerintah Belanda sengaja mengisolasi warga keturunan etnis Tionghoa dengan cara membuat permukiman khusus bagi mereka dan keturunannya yang disebut sebagai pecinan. Kedua, pemerintah Hindia Belanda sengaja menciptakan suasana psikis agar mereka selalu takut dan cemas. Ketiga, mereka diikat dengan persyaratan dan perjanjian dengan penguasa. Politik minoritas sengaja dirancang untuk menangkal tumbunya kekuatan dari masyarakat kelas menengah dan berpeluang mengancam pemerintahan kolonial Belanda. Selain itu, sebagai cara untuk membangun struktur sosial ekonomi yang aman. Pada akhirnya memberikan citra buruk terhadap warga keturunan etnis Tionghoa di Indonesia terutama di Jawa (Kompas, 20 November 2000).

Namun demikian, etnis Tionghoa Sukabumi tetap bisa memperlihatkan eksistensinya, terlihat dari adanya andil masyarakat etnis Tionghoa Sukabumi dalam perkembangan pers di Indonesia, yakni tepatnya pada 12 Januari 1901 peranan etnis Tionghoa di Kota Sukabumi menerbitkan surat kabar pertama di pulau Jawa yang bernama *Li Po* (Suryadinata, 2010). Selain dalam bentuk pembatasan sosial, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa juga dilakukan dengan cara mewajibkan etnis Tionghoa menunjukkan kekhasan dari kebudayaan dan adat istiadat mereka. Ciri khas yang sangat jelas dari etnis Tionghoa adalah ketionghoan mereka, yakni berkucir, pemakan daging babi, bernama Tionghoa dan selalu terdapat meja altar sembahyang di setiap rumah mereka. Kewajiban berambut kucir untuk mengucilkan etnis Tionghoa sehingga mereka terlihat mencolok apabila berada di tengah masyarakat bumiputera agar tidak terjadi persekutuan antara mereka (Onghokham, 1999). Selain itu, ketionghoan mereka juga terlihat dari ciri-ciri kebudayaan mereka, seperti pemujaan terhadap nenek moyang, nilai dan norma tertentu, serta nama mereka (Tan, 1979).

Etnis Tionghoa pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dibebaskan dalam menjalankan segala aktivitas agama, kepercayaan dan adat istiadat mereka secara terbuka di depan umum, Salah satunya yakni perayaan Imlek dan Cap Go Meh. Oleh karena itu, etnis Tionghoa sangat kental dengan ketionghoan mereka. Namun demikian, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa terjadi manakala memasuki masa kemerdekaan, terutama pada periode Orde Lama dan Orde Baru. Akibat dari adanya diskriminasi berlebihan dari pemerintah pada tahun 1960-an terjadi repatriasi masyarakat etnis Tionghoa ke Tiongkok. Sekitar 136.000 etnis Tionghoa meninggalkan Indonesia, dan 100.000 di

antaranya kembali ke Tiongkok. Hal ini terjadi akibat dari adanya diskriminasi dalam aturan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia (Skober, 2006).

Meskipun, etnis Tionghoa mengalami diskriminasi, namun nyatanya kesejahteraan mereka tidak terganggu. Hal tersebut memicu terjadinya kerusuhan anti Tionghoa di beberapa kota di Indonesia. Seperti Cirebon, Bandung, Bogor dan Sukabumi. Kerusuhan dipengaruhi oleh permasalahan ekonomi dan pendidikan. Adanya perbedaan yang sangat jauh antara tingkat perekonomian dan pendidikan masyarakat bumiputera dengan etnis Tionghoa (Lubis, 2011). Kerusuhan terjadi di Sukabumi terjadi 18 dan 19 Mei 1963 dan menjadi kerusuhan yang besar dibandingkan kerusuhan yang terjadi di kota-kota lainnya. Dalam harian Merdeka edisi 20 Mei 1963, Presiden Soekarno menyatakan bahwa kerusuhan yang terjadi di Cirebon, Bandung, Bogor dan Sukabumi merupakan gerakan kontra-revolusioner yang ditujukan terhadap tokoh besar revolusioner yakni Soekarno.

Perubahan Nama

Pergantian nama dari Tionghoa ke nama-nama yang berciri khas Indonesia, Sunda, dan Jawa terjadi secara besar-besaran akibat dari peraturan pemerintah yang dikeluarkan yakni Keputusan Presidium Kabinet No.127/Kep/12/1966 mengenai pergantian nama di kalangan etnis Tionghoa di Indonesia. Meskipun demikian, etnis Tionghoa masih mempertahankan nama Tionghoa mereka sehingga terkadang dalam setiap ritual atau perayaan biasanya selain disebutkan nama Indonesia juga disebutkan nama Tionghoa.

Contohnya, Gunawan yang memiliki nama Agus Gunawan, masih diberi nama Tionghoa, meskipun orangtua Gunawan sendiri telah berganti nama Indonesia. Nama Tionghoa dari Gunawan yakni Nio Cung Yun yang memiliki arti sebagai “raja”, sehingga disamping nama Indonesia, Gunawan masih memiliki nama Tionghoa (wawancara dengan Gunawan, 24 Desember 2017). Sementara Haddi Djaja Suria, yang menggunakan nama Indonesia, sudah tidak lagi menggunakan nama Tionghoa. Meskipun memiliki nama Tionghoa bermarga Tan, akan tetapi Suria tidak mengetahui nama Tionghoanya kecuali nama keluarga (wawancara dengan Suria, 24 Agustus 2017).

Keputusan Presidium Kabinet No.127/Kep/12/1966 yang dikeluarkan oleh pemerintah menyebabkan sebanyak 6621 jiwa etnis Tionghoa di Sukabumi melakukan ganti nama secara serempak. Ganti nama di kalangan etnis Tionghoa memang merupakan hal yang biasa dan sudah terjadi sejak lama, terutama sejak ditetapkannya perjanjian dwi kewarganegaraan pada 1955 di Bandung. Akan tetapi, hal yang menjadikan ganti nama semakin menarik yakni adanya ganti nama secara massal yang terjadi di Sukabumi. Biasanya ganti nama di kalangan etnis Tionghoa dilakukan berdasarkan motif pribadi seperti demi keuntungan material, adanya semangat patriotisme, dan motif lainnya. Akan tetapi, pada fenomena ganti nama yang terjadi serentak di Sukabumi merupakan hal yang tidak lazim. Selain itu, pada saat sidang ganti nama tersebut sekaligus juga dilakukan untuk proses ganti kewarganegaraan dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Maka orangtua dari Gunawan akhirnya melepas kewarganegaraan Asing (Tiongkok) dan menjadi Warga Negara Indonesia,

bersamaan dengan sidang ganti nama. Orangtua dari Gunawan sendiri memiliki nama Tionghoa Ong (Nio Tek Kyung) yang kemudian berganti nama menjadi nama Indonesia yakni Buyung Rusmawan. Pada sidang tersebut, orangtua Gunawan diberi sertifikat sebagai bukti bahwa telah melakukan sidang ganti nama dan ganti kewarganegaraan (wawancara dengan Gunawan, 24 Mei 2017).

Kebijakan mengenai ganti nama merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat proses asimilasi antara keturunan etnis Tionghoa dengan masyarakat bumiputra. Akan tetapi, dengan diterapkannya kebijakan ganti nama ini, terlihat bahwa proses asimiliasi cenderung dipaksakan oleh pemerintah dan tidak terjadi secara natural antara keturunan etnis Tionghoa dengan masyarakat bumiputra. Ganti nama ditujukan untuk menghapus identitas kelompok orang Indonesia keturunan Tionghoa, untuk mencapai tujuan asimilasi sendiri yang menghilangkan identifikasi sebagai anggota golongan minoritas, yakni peleburan seratus persen menjadi orang Indonesia asli (Suryadinata, 2005).

Aktivitas Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat

Pemerintah orde baru mengeluarkan instruksi Presiden No.14 tahun 1967 mengenai segala bentuk aktivitas agama, kepercayaan, dan adat istiadat yang berciri khas Tionghoa tidak boleh diperlihatkan di depan umum. Sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut, masyarakat Tionghoa tidak boleh melaksanakan berbagai aktivitas agama, kepercayaan, dan adat istiadat yang berciri khas ketionghoan mereka. Maka, etnis Tionghoa Sukabumi, melaksanakan segala aktivitas tersebut dengan cara tertutup dan sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga dan kelenteng Bie Hian Kong/Vihara Widhi Sakti.

Setelah diterapkannya Inpres No.14/1967 oleh pemerintah, terdapat beberapa di antara masyarakat etnis Tionghoa Sukabumi yang berpindah keyakinan dan memilih agama Kristen Katolik, Protestan, Buddha dan Islam. Akan tetapi bagi sebagian besar etnis Tionghoa yang masih memegang kepercayaan leluhurnya menyiasati cara berdoa mereka serupa dengan agama Buddha (Wawancara dengan Teddyl, 24 Mei 2017). Kegiatan sembahyang umat Kong Hu Cu setelah diberlakukannya kebijakan tersebut kemudian disatukan dengan kegiatan sembahyang umat Buddha.

Dalam agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa, sembahyang kepada leluhur merupakan sebuah kebiasaan dan ajaran leluhur yang senantiasa dilakukan sebagai penghormatan kepada orangtua baik itu yang masih hidup maupun telah meninggal. Adat dan kebiasaan tersebut bermula dari rasa cinta dan hormat anak kepada orangtua yang kemudian berkembang menjadi rasa cinta dan hormat kepada leluhurnya (Hariyono, 1993). Kegiatan sembahyang tidak hanya dilakukan dengan menyembah dewa-dewi, melainkan juga dengan cara memelihara abu leluhur sebagai bentuk cinta kasih dan rasa hormat mereka.

Setelah diterapkannya Inpres No.14/1967. Beberapa ritual seperti Sembahyang Ceng Beng, sembahyang Cioko, sembahyang Se Jit, Tiong Ciu dan sembahyang ke Kongco, dilakukan secara sederhana dan terbatas hanya dilaksanakan di makam leluhur dan di Vihara Widhi Sakti (Yayasan

Vihara Widhi Sakti, 2012). Sedangkan untuk sembahyang Cioko, meskipun tetap dilaksanakan seperti biasa (sebelum diberlakukan inpres No.14/1967) namun dipersulit perizinannya.

Selain ritual sembahyang, perayaan juga dilaksanakan secara tertutup dan terbatas seperti Perayaan Imlek, Cap Go Meh, dan Pek Cun. Perayaan Imlek, Cap Go Meh, dan Pek Cun/Festival Bacang dilarang untuk dirayakan di depan umum, sehingga perayaan terbatas hanya di lingkungan keluarga dan Vihara Widhi Sakti untuk lingkungan masyarakat keturunan etnis Tionghoa Sukabumi. Selain itu, hanya ritual keagamaannya saja yang dilakukan sedangkan tradisi dan kebudayaan dilarang, hanya tradisi kecil dan sederhana yang dilaksanakan di dalam lingkungan Vihara Widhi Sakti (Marcus, 2003; wawancara dengan Hariyanto, 14 Januari 2018).

Selama lebih dari tiga dekade perayaan imlek selalu diselenggarakan secara tertutup oleh masyarakat etnis Tionghoa Sukabumi. Hal ini tentunya membatasi ruang gerak mereka terutama dalam kebebasan menyelenggarakan aktivitas adat istiadat leluhur yang selalu diselenggarakan secara meriah setiap tahun. Masyarakat etnis Tionghoa mendapatkan angin segar karena pada masa pemerintahan presiden Abdurahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur, Inpres No.14/1967 dihapuskan dan diganti oleh Keppres No.6/2000. Dengan digantinya Inpres menjadi keppres, etnis Tionghoa kembali bebas menyelenggarakan berbagai aktivitas agama, kepercayaan dan adat istiadat leluhur mereka secara terbuka dan meriah. Selain itu, Kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat etnis Tionghoa semakin bertambah ketika pada masa pemerintahan Presiden Megawati, yakni tepatnya pada tahun 2002 Imlek dijadikan sebagai hari libur Nasional. Menurut Megawati, ia menanggapi aspirasi masyarakat umat Kong Hu Cu Indonesia agar Imlek dijadikan sebagai hari libur nasional. Dengan pernyataan tersebut, maka secara otomatis perayaan Imlek pada tahun selanjutnya telah menjadi hari libur nasional (Kompas, 18 Februari 2002). Pernyataan Presiden Megawati kemudian dikeluarkan dalam Keputusan Presiden No. 19 tahun 2002 tentang hari Tahun Baru Imlek.

Setelah dikeluarkannya Keppres No.6/2000, ritual sembahyang Ceng Beng, Se Jit, Tiong Ciu, dan sembahyang ke Kongco, serta perayaan Imlek, Cap Go Meh, dan Pek Cun kembali diselenggarakan secara meriah, bahkan arak-arakan Joli Kongco dan pertunjukan Barong Gie Say semakin menyemarakkan kemeriahan perayaan Cap Go Meh. Tentunya dalam perayaan Cap Go Meh juga terdapat makanan-makanan khas Tionghoa dan Kota Sukabumi sebagai hidangan dan persembahan untuk para dewa dan leluhur. Adapun untuk Sembahyang Cioko dipermudah perizinannya (Yayasan Vihara Widhi Sakti, 2012; wawancara dengan Hariyanto, 14 Januari 2018).

Selain ritual sembahyang dan perayaan, hal lain yang berkaitan dengan aktivitas agama, kepercayaan dan adat istiadat adalah tempat ibadah yakni kelenteng. Pada saat dikeluarkan Inpres No.14/1967, kelenteng Bie Hian Kong yang merupakan tempat sembahyang etnis Tionghoa berganti nama menjadi Vihara Widhi Sakti. Pergantian nama ini tentunya berkaitan dengan fungsinya yang tidak lagi sebagai tempat sembahyang kepada para dewa dan leluhur, melainkan juga kepada Budha Gautama. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan kelenteng agar tidak dihancurkan seiring dengan berlakunya kebijakan Inpres No.14/1967.

Gaya Hidup

Gaya hidup masyarakat keturunan etnis Tionghoa di Kota Sukabumi meliputi beberapa aspek, di antaranya rumah tinggal yang dihuni oleh masyarakat keturunan etnis Tionghoa Sukabumi, baik itu di lingkungan permukiman pecinan maupun di luar lingkungan pecinan. Kebanyakan telah menjadi rumah berbentuk modern, kecuali bentuk rumah-rumah yang berada di sekitar Vihara Widhi Sakti di Jl. Penjagalan dan di sekitar Gang Ikan yang masih merupakan kawasan pecinan Odeon. Hal ini karena di Jl. Penjagalan dan sekitar Gang Ikan merupakan pusat wilayah Pecinan di Sukabumi dan dikenal sebagai kawasan elit. Selain itu, kawasan tersebut merupakan pusat rumah tinggal bagi masyarakat etnis Tionghoa golongan totok. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, kawasan pecinan Odeon kemudian sudah mulai di huni oleh masyarakat bumiputra Sukabumi yang membuka pertokoan di sekitar Jl. Pecinan Odeon. Oleh karena itu, pembauran semakin terlihat antara masyarakat keturunan etnis Tionghoa dengan masyarakat bumiputra, dari segi permukiman yakni tinggal dalam suatu kawasan yang sama. Sementara etnis Tionghoa peranakan hampir sebagian besar tinggal di luar pecinan yakni di kompleks perumahan.

Kemudian perkawinan, etnis Tionghoa di Kota Sukabumi tidak lagi terlalu terikat oleh adat istiadat leluhur mereka. seperti pada perkawinan di lingkungan masyarakat keturunan etnis Tionghoa pada umumnya, biasanya orangtua terlibat dalam pengaturannya karena perkawinan melibatkan keluarga besar dalam tradisi Tionghoa. Mereka juga kerap melakukan amalgamasi yakni perkawinan campur antara individu dari kelompok etnis yang berbeda sehingga membentuk akulturasi dalam keluarga mereka. Selain itu, juga mengenai bahasa yang digunakan oleh mereka dalam berkomunikasi sehari-hari. Kehidupan sehari-hari masyarakat keturunan etnis Tionghoa di Kota Sukabumi terbagi atas tiga golongan. Pertama, masyarakat etnis Tionghoa yang masih menguasai bahasa Tionghoa/Mandarin secara aktif, biasanya sesekali mereka masih menggunakan bahasa Mandarin saat berkomunikasi dengan keluarganya. Kedua, masyarakat etnis Tionghoa yang masih mengerti bahasa Tionghoa tetapi tidak memakai bahasa Mandarin dalam berkomunikasi kesehariannya, biasanya mereka menggunakan bahasa Indonesia. Ketiga, masyarakat etnis Tionghoa yang tidak menguasai bahasa Mandarin meskipun paham huruf-huruf Mandarin, biasanya mereka menggunakan bahasa Indonesia atau Sunda dalam berkomunikasi. Pada contoh kasus ini yakni Gunawan yang hanya mengerti beberapa huruf saja dalam bahasa Mandarin. Oleh karenanya Gunawan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dan Sunda (wawancara dengan Gunawan, 24 Desember 2017).

KESIMPULAN

Proses akulturasi dan asimilasi dalam lingkungan etnis Tionghoa Sukabumi dengan masyarakat bumiputra terjadi dengan sendirinya. Meskipun berbagai kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor terjadinya proses tersebut. Proses akulturasi lebih terlihat dalam perayaan-perayaan tradisi etnis Tionghoa, seperti Imlek, Cap Go Meh, Pek Cun. Sementara proses asimilasi banyak terjadi pada golongan etnis Tionghoa Peranakan, karena pada golongan etnis Tionghoa peranakan, batasan-batasan

antara masyarakat bumiputra dengan etnis Tionghoa sudah tidak lagi dapat terlihat. Hal ini karena, golongan etnis Tionghoa peranakan cenderung lebih mudah untuk menerima pengaruh kebudayaan dan agama setempat. Adanya pernikahan antara etnis Tionghoa peranakan dengan masyarakat Sukabumi merupakan salah satu bentuk asimilasi. Asimilasi sendiri juga digunakan pemerintah kepada seluruh etnis Tionghoa di Indonesia, salah satunya yakni adanya kebijakan ganti nama bagi etnis Tionghoa menjadi nama Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- ANRI. 2013. *Citra Kota Sukabumi dalam Arsip*. Jakarta : ANRI.
- Hariyono. 1993. *Kultur Cina dan Jawa: Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*. Jakarta: PT Sinar Agape Press.
- Herlina, Nina. 2015. *Metode Sejarah*. Cetakan V. Bandung: Yayasan Masyarakat Sejarawan.
- Jaya, Ruyatna. 2003. *Sejarah Sukabumi*. Sukabumi: Pemerintah Kota Sukabumi.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Lubis, Nina Herlina dkk. 2011. *Sejarah Provinsi Jawa Barat 2*. Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Marcus, A. 2003. *Hari-Hari Raya Tionghoa. Cetakan II*. Jakarta: Marwin.
- Ongkhokham. 1999. *Rakyat dan Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Suryadinata, Leo. 2005. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 2010. *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia: sebuah bunga rampai, 1965-2008*. Jakarta: Kompas.
- Tan, Mely G. 1979. *Golongan etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Yayasan Vihara Widhi Sakti. 2012. *Buku Pengantar 100 Tahun Vihara Widhi Sakti (d/h Klenteng Bie Hian Kong) Sukabumi 1912-2002*. Sukabumi: Yayasan Widhi Sakti

Skripsi, Tesis, Disertasi dan Jurnal Ilmiah :

- Kartika, Nyai. 1999. *Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Etnis Tionghoa di Jakarta Tahun 1966-1977*. Skripsi. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Roswandi, H. Iwan. 1987. *Kerusuhan Anti Cina di Sukabumi (18-19 Mei 1963): Tinjauan Sejarah dan Sosiologi Politik*. Skripsi. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Skober, Tanti. 2006. *Orang Cina di Bandung 1930-1960: Siasat Etnis Cina di Bandung dalam Penghadapi Kebijakan Penguasa*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Surat Kabar :

- "Politik Minoritas - Warga Tionghoa Cenderung dijadikan Kambing Hitam". *Kompas*. Edisi 20 November 2000. Hlm. 38.
- "Presiden Tetapkan Imlek Hari Nasional". *Kompas*. Edisi 18 Februari 2002 Hlm. 1 dan 11.

“Rasialisme yang Terjadi di Indonesia Didalangi oleh Subversip Asing”. *Merdeka*. Edisi 20 Mei 1963. Hlm. 1

Sumber Lisan/Informan :

Gunawan, Agus (45 tahun). 2017. Pegawai swasta. Wawancara, Sukabumi, 24 Desember 2017.

Hariyanto, Bambang (46 tahun). 2018. PNS. Wawancara, Sukabumi, 14 Januari 2018.

Teddy (69 tahun). 2017. Karyawan. Wawancara, Sukabumi, 24 Mei 2017.